

Parlementaria

BULETIN PARLEMEN

Nomor 1325/1/III/2025
Januari 2025



Biro Pemberitaan Parlemen

KETUA

**Tahun 2025,
Bersinergi
Bangun Bangsa**

KORPOLKAM

**Penurunan
Biaya Haji 2025
Ringankan Jemaah**

**DPR Tegaskan
Urgensi Efektivitas
Pengawasan**



Media
2025



Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam foto bersama usai memimpin rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Senayan, Selasa (7/1/2025).

FOTO: JAKA/VE

DPR Tegaskan Urgensi Efektivitas Pengawasan

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan krusialnya peran DPR RI untuk mengawasi kinerja pemerintah agar efektif, tepat sasaran, sekaligus bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika negara terkini, ia pun menyoroti berbagai permasalahan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan,

Jakarta, Selasa (21/1). “DPR RI dan pemerintah harus cepat merespons berbagai permasalahan rakyat. Pengawasan terhadap regulasi, kelembagaan, program, dan anggaran harus dijalankan dengan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Puan.

Perlu diketahui, pada masa persidangan ini, DPR RI menggarisbawahi beberapa isu strategis yang harus menjadi sorotan utama pemerintah. Beberapa isu yang harus segera ditindaklanjuti ialah pemenuhan nutrisi generasi muda Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penegakan kode etik

dan hukum aparat penegak hukum (APH) termasuk pengawasan penggunaan senjata api, dan jaminan kesehatan publik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar dirancang dan dilaksanakan dengan baik, memiliki mitigasi risiko, dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga agar rakyat merasakan manfaat nyata dari APBN,” jelas Puan.

Ia pun menekankan pentingnya tata kelola keuangan negara yang efektif dan akuntabel

— **um/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tahun 2025, Bersinergi Bangun Bangsa

Memasuki tahun 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk semakin bersinergi membangun bangsa. Terutama setelah rangkaian Pemilu di tahun 2024 yang cukup panjang dengan berbagai dinamika di dalamnya.

“Tahun 2024, Indonesia menjalani rangkaian Pemilu yang panjang. Dimulai sejak Pileg dan Pilpres pada awal tahun ini, dan berakhir dengan Pilkada,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya.

Ia berharap, semua elemen bangsa saling bergandengan tangan di tahun 2025. Apalagi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal.

Untuk itu, Puan menilai diperlukan kebijakan-kebijakan komprehensif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tentunya ini menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan demi memastikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia juga mendorong agar kualitas aparatur negara dapat diperkuat. **aha**



Ketua DPR RI Puan Maharani.



FOTO: DOK/PDT



Biro Pemberitaan Parlemen



- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- KETUA PENGARAH**
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
- WAKIL PENGARAH**
Suprihartini S.I.P., M.Si. (Deputi Bidang Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si., (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)
- WAKIL PIMPINAN REDAKSI**
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Zoel Anief Iskandar, S.I.Kom., M.A. (Kasubag Analisis Media)
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Sosial)
- REDAKTUR**
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen
- REDAKTUR FOTO**
M. Andri Nurdiansyah
- SEKRETARIS REDAKSI**
Prima Danutirto, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds
- ANGGOTA REDAKSI**
Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom.,
Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom.,
Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom.,
Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah,
S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat
Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntjho Pranowo, Singih Kinanti
Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alayirus, Bunga Leonnaricha
Frista Djsie, Balgeys Maeshyntha,
Anju Alfonso Sitampul, Zulfikar Mubien,
Yasmin Nabila
- FOTOGRAFER**
Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldi Opie,
Hasri Mentrani, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri
- INFOGRAFIS**
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mutia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri
- ADMINISTRASI**
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Wawan
- PENERBITAN**
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)
- DESAIN GRAFIS**
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom.
- IT MEDIA DIGITAL**
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.
Indah Ekawati, S.I.Kom.
- PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**
M. Chairudin, S.Sos, M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Zulfikar, S.A.B.
- ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
- Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam),

Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1). Agenda utama rapat meliputi persiapan pelaksanaan Tim Pengawas Haji DPR RI serta pembahasan isu-isu aktual terkait penyelenggaraan haji.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta Komisi VIII, khususnya Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2025, untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan haji. Pengawasan



FOTO: AFR/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Penurunan Biaya Haji 2025 Ringankan Jemaah

ini meliputi maskapai penerbangan, akomodasi, dan konsumsi jemaah haji. Ia menekankan pentingnya memastikan pelayanan yang optimal bagi para jemaah haji Indonesia.

“Jangan sampai ada jemaah haji

yang kurang mendapat pelayanan. Semua harus berjalan dengan baik, dari transportasi, penginapan, hingga konsumsi,” ujar Dasco dalam rapat tersebut.

Sufmi Dasco juga menyampaikan kabar baik

mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini yang mengalami penurunan sebesar Rp4 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan biaya ini patut diapresiasi meskipun terdapat fluktuasi nilai tukar rupiah **ssb/rdn**



FOTO: AFR/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam foto bersama usai memimpin rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Senayan, Selasa (7/1/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



PT Nol Persen Angin Segar bagi Sistem Demokrasi

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dapat menjadi angin segar bagi sistem demokrasi perpolitikan di tanah air. Meski demikian, Putusan MK itu jangan sampai malah membuat karut-marut baru dalam pelaksanaan Pemilu ke depannya.

“Bukan nantinya malah membuat karut-marut baru, membuat persoalan baru di sistem demokrasi Indonesia kita. Mudah-mudahan dengan ada putusan tersebut sistem kita, demokrasi kita akan bisa semakin baik,” katanya di

Bukan nantinya malah membuat karut-marut baru, membuat persoalan baru di sistem demokrasi Indonesia kita. Mudah-mudahan dengan ada putusan tersebut sistem kita, demokrasi kita akan bisa semakin baik.

TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (3/1).

Diketahui, MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* (PT) 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. Ketentuan itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengatakan pihaknya akan menaati putusan tersebut. DPR akan melaksanakannya sesuai putusan MK. “Kita tunggu saja nanti pemerintah dan DPR seperti apa, ini *kan* belum dibahas, yang pasti perintah-perintah daripada putusan tersebut sudah ada,”

“Demikian juga untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat, dan juga para akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat, kami akan taat hukum dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,” tukasnya. **rdn**

Adies Kadir,
Wakil Ketua DPR RI Bidang KOREKKU.



Berkomitmen Dukung Program Makan Bergizi Gratis



FOTO: IST/PDT

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memastikan bahwa DPR akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut termasuk dalam hal penganggaran dan pengawasan program sesuai kewenangan dewan.

Hal itu diungkapkan Cucun agar memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan agar

pemerintah memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

“Termasuk monitoring atau pengawasan yang ketat karena program MBG dapat dianggap sukses jika tepat sasaran, diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dan tidak menimbulkan kerugian atau beban tambahan bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Rabu (15/1).

Pesan Cucun semakin relevan setelah viralnya sebuah kejadian di mana beberapa sekolah meminta

uang sebesar Rp30 ribu per anak untuk membeli wadah makan terkait program MBG. Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total pungutan bisa mencapai Rp 60 ribu.

Padahal pemerintah telah menegaskan bahwa program MBG tidak memungut biaya tambahan. Oleh karenanya pengawasan yang ketat harus dilakukan agar tidak ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencari celah mencari keuntungan dengan memanfaatkan program MBG. [uc/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tebar Ribuan Bibit Ikan di Toba



Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, saat menebar ribuan benih ikan ke Danau Toba dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Sabtu (11/1/2025).

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menebar ribuan benih ikan ke Danau Toba di Sumatera Utara. Penebaran ini merupakan komitmen untuk menjaga ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di sekitar danau.

Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Saan menyempatkan diri menebar ribuan bibit ikan ke danau yang terkenal dengan keindahan alam dan legenda sejarahnya itu. “Kita ingin memberikan kesejahteraan kepada para nelayan warga sekitar, maka ikannya harus kita jaga dan

rawat. Salah satu caranya adalah dengan terus menebar benih ikan di Danau Toba agar populasinya terus bertambah,” ujar Saan di Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (11/1).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap penebaran bibit ikan ini dapat menjaga kelangsungan ekosistem ikan di Danau Toba sekaligus memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur di kawasan pariwisata Danau Toba.

“Kita ingin program strategis nasional kawasan pariwisata di Samosir ini bisa dipercepat pertumbuhannya. Dengan membangun infrastruktur yang baik, kita dapat menarik wisatawan

domestik maupun internasional dalam skala besar,” jelas Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi masalah hama ikan red devil yang mengganggu ekosistem di Danau Toba.

“Untuk mengatasi hama *red devil* ini, kami tidak bisa bekerja sendiri. Danau Toba meliputi tujuh kabupaten, sehingga perlu koordinasi dengan provinsi agar masalah ini dapat diselesaikan,” kata Vandiko. — eno/rdn



Bahas Pekerja Migran hingga Gencatan Senjata Gaza

Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/1). Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa diskusi mencakup berbagai isu bilateral, mulai dari nasib pekerja migran Indonesia di Yordania hingga pandangan terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina.

“Anggota Komisi I DPR banyak menanyakan tentang hubungan bilateral, khususnya terkait pekerja migran Indonesia di Yordania, termasuk akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum. Duta Besar Sudqi Al Omoush menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Yordania memberikan perlakuan yang setara, baik kepada warga negara Yordania maupun pekerja asing,” ujar Utut usai pertemuan.

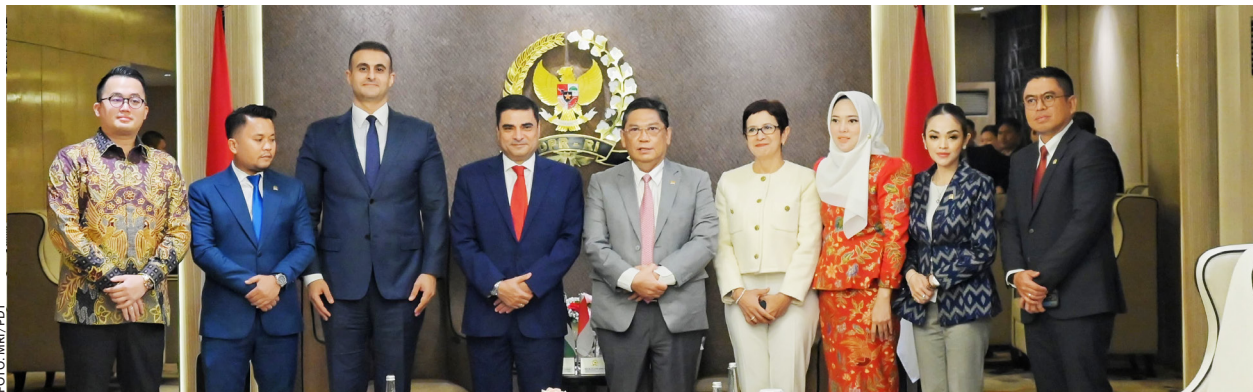
Legislator Dapil Jawa Tengah VII ini juga menyoroti potensi kerja



Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam foto bersama usai menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Senin (20/1/2025).

sama yang dapat dikembangkan kedua negara. “Tadi kami sepakat untuk meninjau kembali MoU-MoU yang belum terlaksana, guna mengidentifikasi hambatan yang ada. Kami juga memastikan

bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan jaminan. Serta, Yordania juga membuka peluang bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di sana,” jelasnya. **we/aha**



Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam foto bersama usai menerima kunjungan kehormatan (*courtesy call*) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Senin (20/1/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Jangan Ada Lagi Polisi Tolak Laporan Masyarakat

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendesak agar jangan ada lagi persoalan polisi menolak laporan dari masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum. Sebab, larangan menolak laporan tersebut sudah ditegaskan dalam Peraturan Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 7/2022.

“Perlu ada kesadaran dan pemahaman Perkapolri Nomor 7 Tahun 2002 bahwa anggota Polri dilarang menolak pengaduan masyarakat. Jadi terhadap orang yang minta perlindungan, rakyat yang minta perlindungan dilarang menolak,” tegas Rudianto dalam keterangan kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Jumat (10/1)

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I itu mengungkapkan, jika anggota Polri memahami ketentuan tersebut, semestinya peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil yang merengg nyawa itu tak terjadi. Polisi menolak mendampingi masyarakat sehingga masyarakat tak mendapatkan perlindungan hukum.

“Seandainya didampingi polisi, bisa saja tidak terjadi peristiwa itu. Sumber awalnya kan di situ. Kita berharap ke depan anggota Polri di Polsek, Polres agar setiap laporan masyarakat haram hukumnya ditolak,” ungkap Rudianto.

Menurutnya, polisi tidak hanya sekadar menerima laporan semata, tetapi laporan itu harus

ditindaklanjuti secara profesional sehingga terdapat kepastian hukum dan tujuan polisi yang mengayomi

Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh, hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatan.

dan melayani masyarakat dapat terwujud nyata.

“Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh, hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatan,” pungkasnya.

— **bia/rdn**



FOTO: EOT/PDT



Rudianto Lallo
Anggota Komisi III DPR RI

Kerusakan Lingkungan dan PHK Freeport Jadi Sorotan

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (15/1/2025) dengan agenda mendengarkan masukan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat Babel dan perwakilan pekerja yang di-PHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia. Diskusi mencakup persoalan lingkungan di Bangka Belitung dan dampak ekonomi serta sosial akibat praktik pertambangan dan pemutusan hubungan kerja.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dalam waktu dekat untuk membahas berbagai permasalahan hukum, termasuk kasus terkait Bangka Belitung dan Freeport. "Kita perlu data lengkap dan mendalam sebelum mengambil langkah lanjutan. Semua informasi dari masyarakat akan diterima dan diolah," jelas Habiburokhman.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyoroti kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat



FOTO: DEB/PDT

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat Babel dan perwakilan pekerja yang di-PHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia, Rabu (15/1/2025). Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, saat diwawancara usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

eksploitasi tambang yang dinilai telah merugikan masyarakat. Ia juga mengkritik klaim kerugian lingkungan sebesar Rp271 triliun yang disebut-sebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan.

Hinca mengusulkan pembentukan Panja Penegakan

Hukum Sumber Daya Alam untuk fokus pada kasus di Bangka Belitung. Sementara itu Habiburokhman juga mengajak semua pihak untuk memprioritaskan asas manfaat dalam penyelesaian masalah ini. "Jangan hanya bicara kepastian hukum atau keadilan, tapi lihat manfaatnya untuk masyarakat. Jangan sampai tambang-tambang besar menyisakan luka lebih dalam," tambahnya.

Selain isu lingkungan, Komisi III turut mendengarkan keluhan dari perwakilan pekerja yang di-PHK sepihak oleh PT Freeport Indonesia. Ia meminta agar para pekerja melengkapi data dan berkoordinasi dengan sekretariat Komisi III untuk pembahasan lebih lanjut.

— ssb/aha

JANGAN HANYA BICARA KEPASTIAN HUKUM ATAU KEADILAN, TAPI LIHAT MANFAATNYA UNTUK MASYARAKAT. JANGAN SAMPAI TAMBANG-TAMBANG BESAR MENYISAKAN LUKA LEBIH DALAM.

Habiburokhman

Ketua Komisi III DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tangkap Pelaku Beking Pemagaran Laut!

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan terus mendesak pemerintah untuk mengungkap misteri di balik pembangunan pagar laut Tangerang. Pagar laut itu, tegasnya, tidak cukup hanya disegel, tapi beking dan pelakunya juga harus ditangkap.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut di wilayah

Itu tidak masuk akal. Dari mana mereka punya uang begitu besar. Pasti ada yang mendanai. Itu yang harus diusut.

Kabupaten Tangerang, Banten. Sebab, pembangunan pagar itu tidak mempunyai izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Legislator asal Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) I itu mengatakan, penanganan masalah pagar laut itu tidak cukup hanya dengan penyegelan. Pemerintah dan aparat harus tetap mengusut tuntas persoalan itu. "Itu harus usut tuntas sampai ketemu siapa yang memerintahkan pemasangan pagar sampai 30,16 km tersebut," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, **Parlementaria**, di Jakarta, Rabu (15/1).

Daniel mengatakan, persoalan itu harus menjadi perhatian KKP dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku. Apalagi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) sudah menyatakan bahwa pembangunan pagar laut itu melanggar aturan. Maka persoalan pagar itu harus segera dibersihkan agar tidak mengganggu aktivitas nelayan.

Daniel menegaskan, tidak mungkin pembangunan pagar laut yang sangat panjang itu dibiayai masyarakat. Jadi, tidak benar jika ada organisasi masyarakat yang mengaku membangun dan membiayai pembangunan pagar. "Itu tidak masuk akal. Dari mana mereka punya uang begitu besar. Pasti ada yang mendanai. Itu yang harus diusut," papar Daniel Johan. — **tn/rdn**

Daniel Johan
Anggota Komisi IV DPR RI

FOTO: AFR/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



EMedia
Pusat Pemberitaan Parlemen



**KONSEP BARU
PPDB**

PPDB MENJADI SPMB 2025

4 GARIS BESAR KONSEP BARU PPDP



Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diubah menjadi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB)



Pemerintah menambahkan kuota PPDB jalur afirmasi, yaitu untuk siswa dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas.



jalur zonasi diganti dengan domisili



Konsep spmb akan berlaku di bulan februari 2025

**RAKYAT AKAN SENANG DENGAN
KEPUTUSAN INI KARENA JAUH LEBIH
AKOMODATIF**

diolah berbagai sumber



MY ESTI WIJAYATI
WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI

DPR Segera Panggil ID FOOD Soal Raibnya Aset

Komisi VI DPR RI memastikan akan memanggil jajaran Direksi ID FOOD secara resmi terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal hilangnya 147 aset senilai Rp3,32 triliun, yang diduga telah dikuasai pihak lain. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan bahwa agenda ini digelar guna memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap kerja mitra kerja.

Pernyataan ini disampaikan melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria, di Jakarta, Selasa (21/1). "DPR tentu segera memanggil dan minta klarifikasi jajaran ID FOOD. Menjadi agenda terdekat (Komisi VI). Tentu, itu tugas kita DPR. Pengawasan. Negara tak boleh dirugikan dan itu juga menghambat pelayanan ke rakyat," tegas Anggia.

Tidak hanya itu saja, dirinya mendorong aparat penegak hukum dapat

mengusut tuntas dan menelusuri soal laporan BPK terkait persoalan 147 aset senilai Rp 3,32 triliun milik

Saya sebagai Pimpinan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) akan memanggil juga direksi ID FOOD untuk memberikan penjelasan.

ID FOOD yang dikuasai pihak lain. "Harus diusut tuntas," tandas Politisi Fraksi PKB itu.

Selaras, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyatakan turut akan memanggil jajaran Direksi ID FOOD untuk menjelaskan temuan BPK tersebut. Ia pun mendukung adanya pemeriksaan yang lebih rinci terkait raibnya 147 aset ID FOOD senilai Rp 3,32 triliun.

"Saya sebagai Pimpinan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) akan memanggil juga direksi ID FOOD untuk memberikan penjelasan," tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

um/rdn

Anggia Erma Rini,
Ketua Komisi VI DPR RI.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: EOT/PDT

Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah, Makan Siang Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa pengelolaan dana zakat harus berlandaskan prinsip syariah dan transparansi agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.

“Zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai ketentuan syariah. Jika program ini ditujukan kepada mustahik, seperti anak-anak dari keluarga miskin, maka bisa dianggap tepat sasaran,” ujar Sigit dalam keterangan resminya, Kamis (16/1).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi VIII DPR RI itu juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Masyarakat harus tahu ke mana zakat mereka disalurkan. Laporan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat,” tegasnya.

Sigit, yang juga dikenal sebagai Pasha Ungu, mendorong sinergi



Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo.

FOTO: MUN/PDT

antara pemerintah dan lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran dana zakat.

Namun, ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan dana zakat. Dana tersebut, katanya, harus benar-benar dialokasikan untuk mereka yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah, agar tidak memicu polemik di masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Sigit berharap program MBG dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. “Jika dijalankan, program ini harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah,” tutupnya.

— ssb/aha

JIKA DIJALANKAN, PROGRAM INI HARUS BENAR-BENAR MEMBAWA MANFAAT BAGI MASYARAKAT YANG MEMERLUKAN TANPA MELANGGAR PRINSIP SYARIAH.

Sigit Purnomo

Anggota Komisi VIII DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kuota Haji 2025 Tetap Sebanyak 221.000 Jemaah

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akhirnya menandatangani kesepakatan kerja sama untuk penyelenggaraan haji 2025. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah kuota haji asal Indonesia tetap 221.000 orang.

“Kami bersyukur kesepakatan penyelenggaraan haji antara

Indonesia dan Arab Saudi tercapai. Kami akan kawal kesepakatan ini agar memastikan jemaah haji asal Indonesia bisa menunaikan kewajiban rukun Islam kelima

Kami bersyukur kesepakatan penyelenggaraan haji antara Indonesia dan Arab Saudi tercapai. Kami akan kawal kesepakatan ini agar memastikan jemaah haji asal Indonesia bisa menunaikan kewajiban rukun Islam kelima ini dengan khusyuk, sehat, dan nyaman.

ini dengan *khusyuk*, sehat, dan nyaman,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (16/1).

Untuk diketahui penandatanganan kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia – Arab Saudi dilakukan oleh Menteri Agama Indonesia Nazaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi. Kesepakatan ini menandai secara resmi pelaksanaan tahapan layanan haji untuk jemaah asal Indonesia.

Marwan mengatakan beberapa poin kesepakatan dalam kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia-Arab Saudi di antaranya meliputi jumlah kuota haji dari Indonesia, bandara penerimaan dan pemulangan jemaah asal Indonesia, hingga layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah asal Indonesia.

“Komisi VIII akan memastikan kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi diterapkan pada pelaksanaan haji 2025 ini,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Dia mengungkapkan sebanyak 221.000 jemaah haji asal Indonesia akan datang secara bertahap ke tanah suci. Sebanyak 110.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah dan kembali melalui Bandara King Abdul Azis di Jeddah. Sedangkan, sebanyak 110.500 jemaah haji Indonesia menggunakan rute tiba di Bandara King Abdul Azis di Jeddah dan kembali melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah. — rdn

Marwan Dasopang,
Ketua Komisi VIII DPR RI.

FOTO: DOK/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, tidak sepakat dengan usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas.

“Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin,” ujar Irma dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (16/1).

Irma mengusulkan biaya MBG diambil dari sumber lain, salah satunya menggunakan dana cukai rokok. “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Politisi dari Dapil Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar



Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani.

FOTO: DOK/PDT

Dana MBG Dapat Diambil dari Cukai Rokok

Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu meminta agar program MBG tidak ‘digoreng’

dengan usulan kontroversial. “Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah

menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong agar program MBG dapat dimaksimalkan. Dia mengusulkan agar dana zakat dapat dipakai untuk program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program MBG ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan, Selasa (14/1).

— aha

ZAKAT ITU KAN FUNGSINYA UNTUK KEMASLAHATAN UMAT, YA FUNGSIKAN SAJA UNTUK ITU. BANTUAN KE FAKIR MISKIN. UNTUK MBG SAYA USUL AMBIL DARI CUKAI ROKOK SAJA SUDAH SELESAI. CUKAI ROKOK PER TAHUN RP150 T.

Irma Suryani

Anggota Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sambut Baik Anggaran Tukin Dosen Disetujui

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan kabar gembira bahwa Kementerian

Kabar gembira bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN. Atas dasar itu, pihaknya berkomitmen akan mengawal pencairan tunjangan yang menjadi hak para dosen itu.

Lalu Hadrian Irfani,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Keuangan telah menyetujui anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN. Atas dasar itu, pihaknya berkomitmen akan mengawal pencairan tunjangan yang menjadi hak para dosen itu.

Lalu Ari, sapaan akrabnya, mengatakan, sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti-Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan bahwa Kemenkeu sudah menyetujui hitungan anggaran tukin dosen ASN yang diajukan Kemendikti Saintek.

"Ini tentu kabar baik bagi para dosen ASN. Tidak lama lagi mereka akan mendapatkan hak mereka yang selama lima tahun tertunda," ujar Lalu Ari dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Soal besaran anggaran, Politisi Fraksi PKB itu mengatakan bahwa Kemendikti-Saintek telah mengajukan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk tukin dosen ASN, tetapi yang disetujui hanya Rp2,5 triliun.

"Namun untuk kepastian besaran tukin dosen ASN, kita tunggu data resmi dari Kemenkeu dan Kemendikti-Saintek. Yang jelas kami akan kawal pencairan tukin dosen sampai tuntas," ungkap Lalu Ari.

Legislator asal Dapil NTB II itu meminta pemerintah segera menyelesaikan rancangan Perpres yang memungkinkan pembayaran Tukin, baik secara penuh maupun dengan skema alternatif seperti penambahan tunjangan sertifikasi dosen.

rdn



FOTO: RSB/PDI



Perusahaan Ritel Terlanjur Pungut PPN

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka membahas polemik soal kenaikan PPN 12 persen.

Diketahui, Presiden Prabowo menghendaki agar tarif PPN yang berlaku untuk barang/jasa nonmewah adalah 11 persen, bukan 12 persen. Namun, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang dikeluarkan Kemenkeu memilih mengatur bahwa tarif dasar PPN yang berlaku adalah 12 persen. Meskipun, pada akhirnya, Prabowo dengan jelas menyatakan

pada tanggal 31 Desember 2024 bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya

Tidak seharusnya DJP membuat penafsiran atau ketentuan yang berbeda dari perintah presiden sehingga bisa berakibat timbulnya ketidak

percayaan masyarakat kepada pemimpin tertingginya.

Misbakhun,
Ketua Komisi XI DPR RI.

berlaku untuk barang dan jasa mewah.

“Memang ada faktor pengali atau DPP (Dasar Pengenaan Pajak, red) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual sehingga hasil akhir nilai PPN yang dipungut (untuk barang nonmewah) tetap 11 persen, alias PPN tidak mengalami kenaikan tarif. Tetapi, peraturan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Beberapa perusahaan ritel terlanjur memungut PPN 12 persen,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Jumat (3/1/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini bahkan mempertanyakan loyalitas Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan memintanya untuk mundur dari jabatannya. Dalam waktu dekat, Komisi XI DPR pun berencana memanggil jajaran Kemenkeu untuk membahas hal itu.

“Tidak seharusnya DJP membuat penafsiran atau ketentuan yang berbeda dari perintah presiden sehingga bisa berakibat timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin tertingginya,” tegasnya.

Di sisi lain, Misbakhun menilai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak mengandung larangan penerapan multitarif pajak pertambahan nilai (PPN).

we/rdn

FOTO: RSB/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Peningkatan investasi, khususnya dalam sektor migas, menjadi perhatian utama Komisi XII DPR RI untuk mewujudkan swasembada energi. Hal ini disampaikan dalam agenda resmi Komisi XII DPR RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Indonesia untuk Kuwait, Lena Maryana. Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama dengan 'Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company' (KUFPEC), yang berencana menginvestasikan hingga 10 miliar USD di sektor migas Indonesia.

Dalam wawancara usai pertemuan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1), Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyambut baik peluang investasi



Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya dalam agenda resmi Komisi XII DPR RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Indonesia untuk Kuwait, Lena Maryana di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

FOTO : DEP/PDT

Dukung Kuwait Investasi Migas di Indonesia

dari Kuwait. Investasi ini dinilai selaras dengan target pemerintah untuk merealisasikan swasembada energi sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan melalui investasi sebesar Rp 13.528 triliun.

“Sebagai komisi yang

membidangi energi, swasembada energi merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo yang harus kita dukung. Masuknya investasi ini menjadi peluang baik bagi Indonesia, termasuk dalam mendukung realisasi target swasembada energi,” ujar Bambang,

yang turut didampingi Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Bambang menjelaskan bahwa pemerintah, melalui SKK Migas, telah membuka beberapa blok migas untuk investasi. Saat ini, Kuwait telah memperoleh dua blok dan sebelumnya telah berinvestasi di Blok Natuna. Bambang menegaskan pentingnya memfasilitasi akselerasi investasi dari Kuwait agar lebih masif dan konkret.

“Kami siap hadir sebagai *problem solver* untuk mencari solusi atas kendala investasi, tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut. — **pun/aha**

KAMI SIAP HADIR SEBAGAI *PROBLEM SOLVER* UNTUK MENCARIKAN SOLUSI ATAS KENDALA INVESTASI, TIDAK HANYA MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN.

Bambang Patijaya Ketua Komisi XII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Diskusikan Reformasi Hukum hingga Pendidikan



FOTO: IST/PDT

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya saat menerima Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen. Dalam pertemuan itu, antara lain membahas reformasi hukum, pendidikan, dan upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Belanda.

“Kunjungan ini merupakan momentum yang sangat penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Dari pertemuan ini, harapannya

makin sinergis kerja sama di berbagai sektor dan memberi dampak positif bagi kemajuan Indonesia, khususnya dalam bidang hukum dan pendidikan,” ujar Willy saat menerima Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur itu mengungkapkan, kunjungan Marc yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Zilla Boyer, juga

membahas sistem pemasyarakatan, keimigrasian, dan hak asasi manusia (HAM).

Willy berharap ada kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda demi memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Sementara itu, Marc menyatakan kesiapan Kerajaan Belanda untuk berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia di sejumlah sektor. Terutama, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

 rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



RUU Minerba, Soroti Pengelolaan SDA Oleh Ormas



Pimpinan serta Anggota Badan Legislasi DPR RI usai rapat pleno Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara di Senayan, Senin malam (20/1/2025).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat pleno yang digelar pada Senin malam (20/1) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RUU ini direncanakan akan dibawa ke rapat paripurna untuk tahapan pembahasan selanjutnya.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan,

menyatakan bahwa RUU Minerba perlu diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berharap penyusunan ini dapat dilanjutkan dengan kajian mendalam dan partisipasi publik untuk penyempurnaan,” ujarnya.

Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah pemberian prioritas pengelolaan tambang dengan luas lahan di bawah 2.500 hektare kepada UKM. Selain itu, ormas keagamaan dan perguruan tinggi juga diusulkan dapat memperoleh wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Namun, usulan ini mendapat

catatan penting agar dilakukan kajian mendalam. “Kami harus memastikan bahwa substansi RUU ini matang dengan melibatkan partisipasi publik, termasuk para ahli bahasa, ahli pertambangan, dan pelaku usaha terkait,” ujar Bob Hasan.

RUU Minerba yang telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola sektor mineral dan batu bara di Indonesia. Dengan revisi ini, diharapkan peran masyarakat semakin diperkuat dalam pengelolaan SDA untuk mendukung kesejahteraan bersama.

— **ssb/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Sambut Positif Gencatan Senjata Hamas-Israel

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Hamas Palestina dan Israel yang diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, pada Rabu (15/1). Kesepakatan yang akan berlangsung selama enam pekan mulai Ahad (19/1) ini dinilai sebagai langkah awal untuk menghentikan kekerasan di Jalur Gaza.

“Ini langkah sangat positif dan implementasi yang terlambat dari mandat Resolusi DK PBB 2735. Kita harus memastikan gencatan senjata ini segera menghentikan genosida di Jalur Gaza, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan menarik pasukan Israel dari wilayah

Ini langkah sangat positif dan implementasi yang terlambat dari mandat Resolusi DK PBB 2735. Kita harus memastikan gencatan senjata ini segera menghentikan genosida di Jalur Gaza, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan menarik pasukan Israel dari wilayah tersebut.

tersebut,” ujar Mardani dalam pernyataannya, Kamis (16/1).

Meski demikian, Mardani mengingatkan bahwa kesepakatan ini belum ideal. “Hanya selang beberapa jam setelah diumumkan, Israel kembali melancarkan serangan udara di Gaza utara yang menargetkan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Ini kebiasaan Israel yang harus kita waspadai,” tegasnya.

Mardani menekankan pentingnya peran komunitas internasional dalam mengawal kesepakatan ini agar menjadi permanen dan mencegah potensi pelanggaran oleh Israel. Selain itu, ia juga menyoroti pengesahan undang-undang di Knesset yang melarang operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang ia nilai sebagai tindakan ilegal.

“UNRWA adalah nafas bagi lebih dari enam juta pengungsi Palestina. Kami di BKSAP DPR akan membawa isu ini ke forum Inter-Parliamentary Union untuk memperjuangkan pengembalian peran UNRWA,” jelasnya. — **ssb/aha**

Mardani Ali Sera,
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen
(BKSAP) DPR RI.



FOTO: DOC/ANDRIPDT





Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat menerima audiensi dari Ismail, seorang guru honorer di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung.
FOTO: JKA/PDT

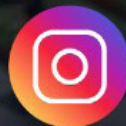


SCAN BARCODE DISINI



DARI RUANG SIDANG

TVR
PARLEMEN



@TVR.PARLEMEN



TVR PARLEMEN



TVR PARLEMEN



TVR PARLEMEN

WWW.TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID



9 772614 339005



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri